



**PENUMPASAN GERAKAN DI/TII DI KABUPATEN TEGAL TAHUN  
1949-1962**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun oleh :**

**NURUL FATIMAH**

**NIM 13030114120036**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya Nurul Fatimah, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar keserjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun yang tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, Juli 2019

Penulis,

Nurul Fatimah  
NIM 13030114120036

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### *MOTTO*

“Dunia ini tidak kekal, termasuk peluru dan senjatamu. Suatu saat nanti pasti akan habis dan rusak juga”

(TNI Angkatan Darat)

“Janganlah menjadi manusia yang fanatik terhadap pemimpin. Para pemimpinmu juga manusia biasa yang dapat menipu dengan kata-kata manisnya.”

(TNI Angkatan Darat)

Dipersembahkan untuk:  
Ibu, Mas, Mbak dan Teman-teman.

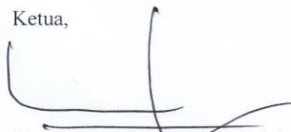
Disetujui,  
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Indriyanto', written over a horizontal line.

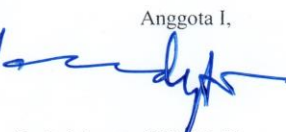
Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum.  
NIP 196407111990011001

Skripsi dengan judul "Penumpasan Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal Tahun 1949-1962" yang disusun oleh Nurul Fatimah (NIM 13030114120036) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Senin, 15 Juli 2019.

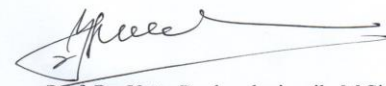
Ketua,

  
Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum.  
NIP. 196808291994031001

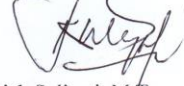
Anggota I,

  
Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum.  
NIP. 196407111990011001

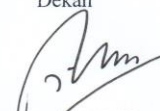
Anggota II

  
Prof. Dr. Yetty Rochwulaningsih, M.Si  
NIP. 196106051986032001

Anggota III,

  
Dra. Titiek Suliyati, M.T.  
NIP. 195612191987032001

Mengesahkan,  
Dekan

  
Dr. Nuhayati, M. Hum.  
NIP. 196610041990012001

## KATA PENGANTAR

Pada setiap perjalanan, pasti akan menemui awal dan akhir, begitu juga dengan masa kuliah penulis. Dalam upaya untuk mendapatkan gelar sarjana dan menuntaskan kewajiban perkuliahan, terlebih dahulu penulis harus menyelesaikan skripsi berjudul “Penumpasan Gerakan DI/TII di Kabupaten Tegal Tahun 1949-1962”. Penulis menyadari bahwa tulisan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah banyak mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

*Pertama*, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan petunjuk, baik berupa material maupun spiritual kepada yang terhormat: Dr. Nurhayati, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. *Kedua*, kepada Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengingatkan penulis untuk terus semangat untuk merampungkan skripsi ini. *Ketiga*, penulis menghaturkan terima kasih kepada Dra. Titiek Suliyati, M.T., yang dengan sabar telah memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis. *Keempat*, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada segenap dosen penguji: Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., Prof. Dr. Yetty Rochwulaningsih, M.Si., dan Dra. Titiek Suliyati, M.T., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

*Kelima*, khusus kepada Ibu dan kakak-kakak penulis yang tidak pernah lelah untuk menyemangati penulis ketika proses penulisan skripsi. Mereka yang selalu mengingatkan penulis untuk selalu fokus terhadap tujuan-tujuan yang ingin penulis capai. *Keenam*, penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas B, terutama Azizah Kusuma Dara, Nur Inayah, Riyana Damayanti, Wahyu Setyaningih, Nur Indah Sholichah, Asna, Nila dan teman-teman lain yang selalu membantu penulis ketika perkuliahan masih berlangsung dan selama masa-masa penulisan skripsi. *Ketujuh*, teruntuk teman-teman organisasi Kharisma yang sudah

mengajarkan kepada penulis tentang kekerabatan, kesolidan pada setiap program-program kerja besar. Kepada teman-teman Kharisma pula, penulis belajar tentang arti tanggung jawab selama tiga tahun. *Kedelapan*, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman kos, teman dekat penulis Vita, Olit, ilmi dan Yoza yang selalu memberikan motivasi kepada penulis. Penulis berharap bahwa dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi kepada para pembaca dan penulis dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan.

Semarang, Juli 2019

Nurul Fatimah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	ii
<b>HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	x
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b>	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xv
<b>ABSTRAK</b>	xvi
<b><i>ABSTRACT</i></b>	xvii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Pemikiran	19
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	26
<b>BAB II</b>	
<b>GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 1949-1962</b>	28
A. Perkembangan Kabupaten Tegal	28
B. Kondisi Geografis	31
C. Kondisi Demografis	35
D. Kondisi Sosial Ekonomi	38
E. Kondisi Sosial Budaya	40
F. Kondisi Sosial Politik	43
G. Perkembangan Organisasi TNI Tegal	46
a. Pembentukan dan Perkembangan Organisasi TNI Tegal	46
b. Tugas dan Wewenang TNI	48
<b>BAB III</b>	
<b>PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN GERAKAN DI/TII KABUPATEN TEGAL 1949-1954</b>	50
A. Pembentukan Organisasi DI/TII	50



B.	Pembentukan Laskar Hizbullah	53
C.	Faktor Penyebab Gerakan DI/TII	61
a.	Sebab Umum	61
b.	Sebab Langsung	63
D.	Usaha DI/TII dalam Menarik Massa	67
E.	Proses Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal	72
<b>BAB IV</b>	<b>PENUMPASAN GERAKAN DI/TII DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 1950-1962</b>	<b>83</b>
A.	Persiapan Pembentukan Operasi Penumpasan	83
B.	Taktik dan Strategi dalam Operasi	90
C.	Proses Penumpasan Gerakan DI/TII	96
D.	Faktor Penghambat Penumpasan Gerakan DI/TII	105
E.	Akhir Penumpasan Gerakan DI/TII	107
<b>BAB V KESIMPULAN</b>		<b>116</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>118</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>125</b>

## DAFTAR SINGKATAN

AMKA	: Angkatan Muda Kereta Api
AUI	: Angkatan Umat Islam
BARIS	: Barisan Rakyat Indonesia
BKN	: Badan Keamanan Negara
DI/TII	: Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia
GBN	: Gerakan Banteng Negara
KTA	: Kaum Terpisah dan Ahlinya
KDM	: Komandan Distrik Militer
KMB	: Konferensi Meja Bundar
MBKD	: Markas Besar Komando Jawa
MIAI	: Majelis Islam A'la Indonesia
MI	: Majelis Islam
NICA	: <i>Nederlandsch Indië Civil Administratie</i>
NU	: Nadhlatul Ulama
PADI	: Pahlawan Darul Islam
PESINDO	: Pemuda Sosialis Indonesia
PETA	: Tentara Pembela Tanah Air
PI	: Perhimpunan Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RM	: Raden Mas
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SWKS	: Sub Wehrkreise
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
VOC	: <i>Vereenigde Oost-indische Compagnie</i>

## DAFTAR ISTILAH

agresi militer	:	Penyerangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk menguasai negara lain melalui media militer
batalyon	:	Sebutan dalam kesatuan militer. Dalam satu batalyon, pasukan terdiri atas dua sampai enam kompi
birokrat	:	Sebutan untuk anggota yang tergabung dalam organisasi pemerintahan dan mengemban tugas administrasi
demobilisasi	:	Tindakan pembebasan tugas yang ditujukan bagi tentara selesai perang
<i>heiho</i>	:	Pasukan bentukan tentara Jepang yang berkedudukan di Indonesia atas Intruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang
<i>keibondan</i>	:	Satuan pembantu polisi yang bertugas dalam menghadapi kebakaran dan tugas lainnya
ketimpangan Sosial	:	Suatu kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat terutama dalam distribusi hal-hal yang dianggap penting dalam suatu masyarakat.
kristalisasi	:	Pengelompokan prajurit berdasarkan pada ideologi yang dianut
<i>mobile Brigade</i>	:	Kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia
mobilitas	:	Berpindah-pindah atau kesiapsiagaan untuk bergerak dari tempat satu ke tempat lain
operasi militer	:	Sebuah aksi yang melibatkan perencanaan dan pengaturan angkatan militer
perang gerilya	:	Cara berperang yang tidak terikat secara resmi dengan ketentuan perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara tiba-tiba

- proklamasi : Pemberitahuan secara resmi kepada rakyat tentang suatu hal
- provokasi : Sebuah tindakan yang mempunyai maksud untuk meningkatkan kemarahan seseorang ataupun suatu kelompok
- Priayi : Orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat.
- reorganisasi : Penyusunan kembali staff-staff yang masuk ke dalam sebuah lembaga atau instansi.
- sub wehrkreise : Sebuah sistem pertahanan daerah untuk mempertahankan wilayah kepulauan atau propinsi yang dipimpin oleh seorang komandan.

## **DAFTAR GAMBAR**

3.1	Potret Amir Fatah dan Kamran Cakrabuwana	65
3.2	Bagan Struktur Organisasi Militer TII	74
4.1	Pembentukan Komando Operasi Gerakan Banteng	87
4.2	Komandan Operasi Banteng Raides Letkol Ahmad Yani	89
4.3	Potret salah satu kurir penyebar brosur perdamaian	92
4.4	Letkol Sarbini Komandan Operasi Gerakan Banteng Negara	98

## **DAFTAR TABEL**

2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tegal	34
2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 1961	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

A	Sumber Koran	125
B	Surat Amanat Wakil Panglima Angkatan Bersenjata RI pada Upacara Peresmian Monumen GBN di Tegal pada Tanggal 6 Oktober 1976.	126
C	Sumber Koran	127

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penumpasan Gerakan DI/TII di Kabupaten Tegal Tahun 1949-1962” mengkaji permasalahan mengapa muncul Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal dan bagaimana operasi penumpasan Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh TNI antara 1949-1962. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, digunakan metode sejarah yang terdiri atas, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sejarah militer.

Kemunculan Gerakan DI/TII di kabupaten Tegal tidak bisa dipisahkan dari adanya kebijakan dari pusat terhadap Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) di dalam TNI. Kebijakan ReRa tersebut dimaksudkan untuk membangun TNI menjadi organisasi militer yang baik dan profesional dengan dasar pendidikan kompetensi yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, dengan ReRa banyak kesatuan militer yang terkena dampak harus dikeluarkan ataupun dibubarkan. Dalam konteks ini, pasukan Hizbullah adalah kesatuan yang terkena dampak ReRa di Brebes. Salah satu organisasi Hizbullah yang kecewa terhadap keputusan ReRa adalah Majelis Islam. Pasukan Majelis Islam pimpinan Abas Abdullah pada akhirnya memutuskan untuk memberontak melawan pemerintah. Pada perkembangannya, Amir Fatah bergabung bersama Abas Abdullah membangun Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal.

Gerakan separatis DI/TII Kabupaten Tegal membuat pemerintah membentuk berbagai operasi penumpasan seperti Gerakan Banteng Negara, Gerakan Banteng Raiders dan operasi gabungan antara pasukan SWKS III dan pasukan SWKS IV. Dalam operasi penumpasan Gerakan Banteng Negara, Panglima Divisi III/GM Kolonel Gatot Subroto menunjuk Letkol Sarbini sebagai Pemimpin Gerakan Banteng Negara. Tujuan pembentukan Gerakan Banteng Negara adalah mencegah anggota DI/TII Tegal menyebarluaskan paham DI/TII di luar wilayah Tegal dan menangkap para tokoh Gerakan DI/TII beserta pemimpinnya sehingga Gerakan DI./TII Tegal dapat berakhir dengan cepat. Pada perkembangannya, operasi penumpasan GBN belum mampu membuat Gerakan DI/TII berakhir, sehingga TNI memutuskan membentuk operasi penumpasan baru yang disebut dengan Gerakan Banteng Raiders. Dalam usaha untuk memaksimalkan operasi penumpasan, Letkol Ahmad Yani selaku pemimpin Operasi Banteng Raiders memberikan pelatihan kepada dua kompi pasukan sehingga dalam melakukan operasi penumpasan dapat lebih maksimal.

Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal berakhir pada tahun 1962, setelah para pemimpin DI/TII seperti Amir Fatah, Syamlawi dan Zaenal Abidin memutuskan untuk menyerahkan diri. Pada 1962, jumlah pasukan DI/TII hanya tinggal lima batalyon saja dengan dipimpin oleh Kastolani, para anggota DI/TII ini memutuskan untuk meletakkan senjata di Losari, Brebes.



## **ABSTRACT**

*This thesis with the title "Suppression of DI/TII Movement in Tegal Regency in 1949-1962" examines the problem why the DI / TII Movement in Tegal emerged and how the operation of crushing DI / TII Movement in Tegal was carried out by the Indonesian National Army in 1949-1962. In examining these problems, historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation and hystorography are used. The approach used is military history.*

*The emergence of the DI / TII Movement in Tegal cannot be separated from the existence of a central policy towards Reorganization and Rationalization (ReRa) within the Indonesian National Army. The ReRa policy is intended to build the Indonesian National Army into a good and professional military organization on the basis of a clear and measurable competency education. Therefore, because of ReRa, many affected military units must be issued or disbanded. In this context, Hezbollah forces are a unit affected by the ReRa in Brebes. One of the organizations of Hezbollah that was disappointed with ReRa's decision was the Islamic Council. The Islamic Assembly Force led by Abas Abdullah finally decided to rebel against the government. In its development, Amir Fatah joined with Abas Abdullah to build the DI / TII Movement in Tegal.*

*The separatist movement of DI/TII in Tegal Regency make the government form various eradication operations such as Gerakan Banteng Negara or the State Bull Movement, Gerakan Banteng Raiders or the Bull Raiders Movement, and the joint operation between SWKS III and SWKS IV troops. In the eradication operation of the Gerakan Banteng Negara, Colonel Gatot Subroto as a commander of Division III/GM appointed Lieutenant Colonel Sarbini as the leader of the Gerakan Banteng Negara. The purpose of Gerakan Banteng Negara is to prevent the DI/TII members in Tegal Regencyin spreading the ideas of DI/TII outside the Tegal Regency and arresting the members and the leaders of the DI/TII Movement so that the DI/TII Movement in Tegal Regency can end quickly. In its development, the eradication operation of the Gerakan Banteng Negara is not able to end the DI/TII Movement, so the TNI decide to form a new eradication operation called the Gerakan Banteng Raiders. To maximize the eradication operation, Lieutenant Colonel Ahmad Yani as the leader of Gerakan Banteng Raiders provides training to two companies of troops so that the eradication operation can be maximized.*

*The DI/TII movement in Tegal Regency has been ended in 1962 after the leaders of DI/TII such as Amir Fatah, Syamlawi, and Zaenal Abidin decide to surrender. In 1962, the number of DI/TII troops is only five battalions led by Kastolani and the members of DI/TII decide to lay down their weapons in Losari, Brebes.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Kemerdekaan mempunyai arti lepas dari segala bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, namun proklamasi Indonesia tidak membuat bangsa asing menyerah untuk menjajah Indonesia kembali. Salah satu negara yang berusaha untuk menjajah Indonesia lagi adalah Belanda. Belanda datang kembali ke Indonesia pada 16 September 1945 dengan menumpang kapal bersama sekutu, Belanda di bawah *Nederlandsch Indie Civiele Administratie* (NICA) berusaha untuk menanamkan kembali kekuasaannya. Tantangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tidak saja datang dari Belanda, gerakan separatis seperti Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) juga turut serta menjadi tantangan dalam mempertahankan kedaulatan.

Pada masa pasca proklamasi, permasalahan yang muncul tidak hanya dari bidang militer saja, di parlemen juga muncul permasalahan baru. Permasalahan ini berawal dari peraturan pemerintah yang membahas tentang banyaknya partai politik yang berdiri dan pemerintah memperbolehkan setiap partai politik mempunyai angkatan senjatanya masing-masing.<sup>1</sup> Pemerintah beranggapan bahwa dengan adanya sistem multi-partai maka pemerintahan demokratis dapat tercapai, sayangnya pemerintahan demokratis yang pemerintah cita-citakan sulit tercapai melalui sistem multi-partai. Penyebab dari hal tersebut adalah setiap partai justru berambisi untuk menduduki jabatan di pemerintahan, Mereka bahkan tidak lagi memikirkan caranya menyejahterakan rakyat. Perkembangan demokrasi parlemen yang sudah tidak lagi berdasarkan pada sistem demokrasi yang sehat membuat

---

<sup>1</sup>Dinas Sejarah Militer TNI, *Gerakan DI/TII Jawa Tengah dan Penumpasannya* (Disjarah TNI AD: Bandung, 1974), hlm. 9.

timbulnya perpecahan.<sup>2</sup> Penyebab perpecahan tersebut adalah perbedaan yang meliputi, perbedaan ideologi. Perpecahan yang berdasarkan atas perbedaan ideologi juga terjadi di kalangan masyarakat. Rasa toleransi yang kurang terhadap perbedaan ditambah dengan adanya kepentingan politik membuat perbedaan ideologi menjadi hal besar yang patut untuk diperdebatkan.<sup>3</sup>

Perbedaan ideologi yang terjadi di palemen maupun di kalangan militer sudah terbentuk sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan tersebut berawal dari pembentukan tentara Hizbullah dan pasukan semi-militer yang lain oleh Pemerintah Jepang. Pada 1943 tentara Jepang menghadapi kesulitan dalam Perang Asia-Pasifik. Kesulitan yang mereka alami berupa kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mereka miliki, padahal untuk meraih kemenangan dalam Perang Asia-Pasifik, Pemerintah Jepang membutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah.<sup>4</sup> Dalam usahanya menyelesaikan masalah di medan perang, Pemerintah Jepang berusaha memanfaatkan negara jajahan untuk membantu Mereka. Pemerintah Jepang dalam mewujudkan tujuannya itu, terlebih dahulu berusaha untuk menarik simpati rakyat untuk mau membantu Mereka. Salah satunya adalah dengan cara menggandeng tokoh-tokoh nasionalis maupun tokoh Islam. Pemerintah Jepang memberikan kebebasan kepada para tokoh nasional untuk mendirikan berbagai organisasi.

Para tokoh Islam memutuskan untuk mendirikan Partai Masyumi dengan tentara Hizbullah yang membarenginya. Pihak nasionalis sendiri membentuk Barisan Pelopor (*Suishintai*) pada 1 Desember 1944, Barisan Berani Mati (*Jibakutai*) pada 8 Desember 1944. Pada awal pembentukan barisan semi-kemiliteran, Pemerintah Jepang meminta balasan atas kebebasan pembentukan

---

<sup>2</sup>A.H Nasution, *Tentara Nasional Indonesia 2* (Jakarta: Seruling Masa, 1968), hlm. 329.

<sup>3</sup>Singgih Tri Sulistiyono, *Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen 1950* (Semarang: Mimbar Offset, 2000), hlm. 2.

<sup>4</sup>Mochammad Ilham, "Historiografi Peran Laskar Hizbullah Pada Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya" (Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm. 14.

organisasi yang mereka berikan. Balasan tersebut berupa pengiriman pasukan Hizbullah ke medan Perang Asia-Pasifik untuk membantu tentara Jepang, namun KH. Hasyim Asy'ari selaku Pembina Hizbullah langsung menolak gagasan tersebut. Menurut KH. Hasyim Asy'ari pengiriman tentara Hizbullah ke medan perang akan sia-sia dan cenderung merepotkan tentara Jepang saja. Penyebabnya adalah pelatihan tersebut tidak ditujukan untuk melawan sekutu, baik dari segi taktik maupun dari segi senjata. Pemerintah Jepang akhirnya memberikan tugas kepada tentara Hizbullah untuk menjaga keamanan Pulau Jawa dari serangan sekutu.<sup>5</sup>

Pada Oktober 1945 pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia dengan anggota yang berasal dari kelaskaran, organisasi semi-militer, Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) dan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA). Dalam proses penggabungan, masing-masing tentara masih memegang ideologi organisasi asalnya dan hal inilah yang menjadi dasar terjadinya perbedaan ideologi di dalam tubuh TNI. Seiring berkembangnya waktu, perbedaan ideologi tersebut menyebabkan terjadinya kristalisasi di tubuh TNI.<sup>6</sup>

Perselisihan yang terjadi di dalam TNI semakin parah dengan adanya kebijakan reorganisasi. Pemerintah menetapkan kebijakan reorganisasi berawal dari terjadinya Agresi Militer Belanda I yang mengharuskan pemerintah menandatangani Perjanjian Renville. Dalam salah satu isi Perjanjian Renville memuat tentang ketentuan TNI yang harus hijrah dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jumlah TNI yang hijrah menuju Jawa Tengah mencapai 35.000 orang. Banyaknya jumlah prajurit yang hijrah membuat pemerintah harus menanggung akomodasi para prajurit, sedangkan di sisi lain pemerintah juga harus membiayai perang melawan Belanda. Pengeluaran yang besar dan tidak diimbangi dengan pemasukan, membuat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) membengkak, sehingga untuk mengurangi beban APBN pemerintah

---

<sup>5</sup>Ilham, "Historiografi Peran Laskar...", hlm. 15.

<sup>6</sup>Dinas Sejarah AD, *Album Peristiwa Pemberontakan DI/TII di Indonesia*, (Disjarah TNI AD: Bandung, 1981), hlm. 9.

memutuskan untuk mengadakan reorganisasi TNI. Pemerintah hanya mempertahankan prajurit yang mempunyai keterampilan dalam memegang senjata, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai keahlian khusus dalam membuat taktik militer, sedangkan prajurit yang tidak memenuhi kriteria pemerintah otomatis akan terkena reorganisasi.<sup>7</sup> Para pasukan yang terkena reorganisasi sebagian besar berasal dari pasukan Hizbullah. Sebagian prajurit yang terkena reorganisasi ada yang merasa kecewa dan merasa bahwa perjuangannya dalam melawan Belanda tidak pemerintah hargai. Pada akhirnya, pasukan yang terkena reorganisasi memutuskan untuk pulang ke daerahnya dan justru memilih untuk berbalik melawan pemerintah.

Salah satu pasukan kelaskaran yang memutuskan untuk mengangkat senjata melawan TNI adalah Majelis Islam. Penyebab Majelis Islam memberontak adalah rasa kecewa terhadap keputusan reorganisasi. Pada awal gerakan, Abas Abdullah memimpin Gerakan Majelis Islam, namun setelah Dewan Pembelaan Masyumi mengirimkan Amir Fatah ke Kerasidenan Pekalongan pada 1948, terjadi perubahan kepemimpinan. Abas Abdullah tidak lagi menjadi pemimpin Majelis Islam, tetapi kedudukan tersebut berganti menjadi milik Amir Fatah. Amir Fatah bergabung bersama Majelis Islam karena organisasi tersebut mempunyai visi misi yang sama untuk mendirikan Negara Islam. Dalam perkembangannya, Gerakan Majelis Islam bergabung bersama Gerakan Darul Islam Kartosuwiryo dan berganti nama menjadi Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Kabupaten Tegal.

Salah satu penyebab terjadinya Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal adalah penandatanganan Perjanjian Renville antara pemerintah dan Belanda. Dalam Perjanjian Renville, pemerintah Belanda mengharuskan TNI untuk menarik anggotanya dari garis demarkasi yang berada di Jawa Barat. Akibatnya TNI harus memindahkan keseluruhan pasukan Siliwangi yang berjumlah 35.000 dari Jawa

---

<sup>7</sup>C Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Pustaka Utama, 1993), hlm. 127.

Barat menuju Jawa Tengah dan Yogyakarta.<sup>8</sup> TNI yang meninggalkan wilayah Jawa Barat dan wilayah Kerasidenan Pekalongan menjadikan kedua wilayah tersebut mengalami kekosongan kekuasaan, baik dari pihak Belanda maupun RI tidak menjaga kedua wilayah tersebut. Sekelompok DI/TII lalu memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendirikan pemerintahannya sendiri. Situasi politik yang berubah membuat situasi militer juga mengalami perubahan. Berdasarkan pada maklumat No. 2/MBKD Kolonel Nasution memutuskan untuk menempatkan kembali pasukan TNI ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian Barat. Pada saat TNI datang kembali ke Jawa Barat, justru TNI mendapatkan sambutan dari pihak DI/TII yang sudah berkembang pesat sejak masa Perjanjian Renville.

Pelopop Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal pada awalnya adalah Abas Abdullah selaku pemimpin Majelis Islam. Abas Abdullah mendirikan Gerakan Majelis Islam pada masa Perjanjian Renville setelah pemerintah mengeluarkan keputusan reorganisasi. Pada perkembangannya, Gerakan Majelis Islam menjadi lebih besar dan Amir Fatah yang tertarik dengan gerakan tersebut memutuskan untuk ikut bergabung bersama Majelis Islam. Amir Fatah datang ke daerah Tegal dan Brebes karena mendapat perintah dari Jenderal Sudirman untuk menjaga daerah Tegal dan Brebes dari serangan Belanda. Amir Fatah yang sudah berbeda ideologi dengan republik kemudian memutuskan untuk bergabung bersama MI. Gerakan Majelis Islam kemudian berkembang menjadi Gerakan DI/TII setelah Amir Fatah menjadi pemimpinnya.

Amir Fatah mulai mendirikan Gerakan DI/TII Tegal pada 5 Januari 1949, berawal dari pertemuan antara Amir Fatah dengan Kamran Cakrabuwana, seorang Panglima Divisi DI/TII Jawa Barat. Dalam usahanya membentuk sebuah pemerintahan militer, Amir Fatah berusaha mengumpulkan massa dengan menggunakan doktrin-doktrin agama. Amir Fatah juga mulai menempatkan pengikutnya masuk ke dalam birokrasi, namun kepemimpinan Amir Fatah di daerah Tegal dan Brebes tidak berlangsung lama, karena setelah itu TNI memutuskan untuk mengirimkan Mayor Wongsoatmodjo. Mayor Wongsoatmodjo

---

<sup>8</sup>Dinas Sejarah AD, *Album Peristiwa Pemberontakan...*, hlm. 1.

selaku pemimpin Batalyon III Brigade VIII/III mendapatkan tugas untuk memimpin Perang Gerilya di daerah Kerasidenan Pekalongan, menggantikan Amir Fatah. Mayor Wongsoatmodjo selanjutnya langsung membentuk Sub Werkhreise III, sebuah pemerintahan yang berbentuk militer. Daerah kekuasaan Mayor Wongsoatmodjo meliputi seluruh daerah Kerasidenan Pekalongan.<sup>9</sup>

Rasa kecewa terhadap perubahan kepemimpinan di Kerasidenan Pekalongan membuat Amir Fatah memutuskan untuk mendirikan Gerakan DI/TII di Brebes. Para pengikut Majelis Islam pun turut serta dalam membantu Amir Fatah dalam mendirikan Gerakan DI/TII. Majelis Islam adalah sebuah organisasi berideologi Islam yang berlokasi di daerah Brebes. Amir Fatah bersama Abas Abdullah pada masa Perjanjian Renville berusaha untuk membangun Majelis Islam menjadi sebuah organisasi besar yang memiliki struktur pemerintahannya sendiri. Dalam merealisasikan usahanya tersebut, Amir Fatah menempatkan S.H Notonegoro sebagai Bupati DI/TII Tegal, H. IS. Pranoto sebagai Bupati DI/TII Brebes dan H.R. Suryodimejo sebagai Residen DI/TII Pekalongan.<sup>10</sup> Kabar keberhasilan Amir Fatah dalam membangun pemerintahannya sendiri ternyata sampai terdengar oleh Kartosuwiryo. Kartosuwiryo yang merasa tertarik kepada Amir Fatah kemudian mengirimkan Kamran Cakrabuwana selaku panglima Divisi I/SH/TII untuk mendatangi Amir Fatah dan mengajaknya bergabung bersama Gerakan DI/TII. Tugas Kamran Cakrabuwana adalah mengajak Amir Fatah sekaligus menyebarkan Gerakan DI/TII di Jawa Tengah. Pandangan yang sama terhadap pemerintahan Islam membuat Amir Fatah memutuskan untuk bergabung bersama Kartosuwiryo. Gerakan DI/TII Brebes yang mendapatkan simpati dari masyarakat Brebes membuat pasukan DI/TII memperluas gerakannya sampai ke Tegal dan menarik minat masyarakat Tegal untuk ikut bergabung bersama Gerakan DI/TII.

---

<sup>9</sup>Dinas Sejarah Militer TNI, *Gerakan DI/TII Jawa Tengah...*, hlm. 12.

<sup>10</sup>Markas Besar TNI Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid II 1950-1959* (Jakarta: Dinas Sejarah TNI, 2000), hlm. 87.

Alasan pasukan DI/TII menyebarkan Gerakan DI/TII di Kabupaten Tegal adalah karena beberapa hal; *Pertama* adalah letak Tegal yang dekat dengan Brebes sehingga lebih mudah untuk menyebarkan pengaruhnya; *Kedua*, adalah struktur geografis Tegal yang masih dikelilingi oleh hutan menjadikan Tegal tempat terbaik untuk menyebarkan Gerakan DI/TII, selain itu pasukan DI/TII juga membutuhkan hutan untuk menyukseskan taktik Perang Gerilya yang Mereka gunakan; *Ketiga* adalah masyarakat Tegal yang masih mementingkan pendidikan agama daripada pendidikan formal membuat masyarakat Tegal bersifat fanatik terhadap agama dan mudah untuk mendapatkan pengaruh tentang ajaran jihad oleh pasukan DI/TII.<sup>11</sup>

Amir Fatah memproklamasikan pendirian Negara Islam Jawa Tengah pada 23 Agustus 1949 di Desa Pengarasan. Hal pertama yang pasukan DI/TII lakukan setelah memproklamasikan gerakannya adalah menyerang pos komando Sub Wehrkreise di Bentarsari dan menangkap Komandan Distrik Militer Brebes (KDM) Abduljalil. Pasukan DI/TII juga menyerang dan melucuti satuan Brigade Mobil, dan mereka menangkap komandan R.M Bambang Suprpto. Beberapa hari kemudian, pasukan DI/TII menembak mati R.M Bambang Suprpto dan Abdul Jalil.<sup>12</sup>

Berdasarkan fakta-fakta terjadinya Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal maka pembuatan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran TNI dalam penumpasan Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal. Penelitian ini menjadi penting karena masih banyak penelitian yang tidak membahas mengenai peristiwa Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal serta taktik yang TNI gunakan dalam menumpas gerakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul permasalahan yang menarik dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan reorganisasi di tubuh TNI malah menimbulkan gerakan separatis DI/TII di Kabupaten Tegal. Dalam rangka menjawab permasalahan ini, beberapa pertanyaan penelitian diajukan sebagai

---

<sup>11</sup>Dinas Sejarah Militer TNI, *Gerakan DI/TII Jawa Tengah...*, hlm. 13.

<sup>12</sup>Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan...*, hlm. 132.



berikut. *Pertama*, apa penyebab terjadinya Gerakan DI/TII Tegal; *Kedua*, bagaimana proses penyebaran Gerakan DI/TII Brebes hingga gerakan tersebut dapat sampai menyebar ke Kabupaten Tegal; *Ketiga*, bagaimana kronologi Gerakan DI/TII Tegal; *Keempat* adalah apa saja upaya yang TNI lakukan untuk menumpas Gerakan DI/TII di Tegal.

## **B. Ruang Lingkup**

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah diperlukan agar penelitian dapat lebih terfokus dan hasilnya dapat lebih dipertanggungjawabkan secara empiris dan metodologis.<sup>13</sup> Penelitian sejarah mengenal tiga ruang lingkup yaitu temporal, spasial, dan keilmuan.

Ruang lingkup temporal dalam skripsi ini adalah tahun 1949-1962. Adapun tahun 1949 menjadi awal penelitian dengan alasan Amir Fatah mulai mengumpulkan massa pada tahun tersebut. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen surat dari Kepala Staff SWKS III Kepada Komandan Brigade (Komandan Daerah I), no. 58/ SWKS III/1949, Maret 1949.<sup>14</sup> Akhir periode Gerakan DI/TII Tegal dipilih pada tahun 1962 dengan alasan bahwa pada tahun 1962 TNI menyatakan bahwa Gerakan DI/TII Kabupaten Tegal sudah selesai sesuai dengan yang tercatat dalam buku *Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah dan Penumpasannya*. Dalam buku *Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah dan Penumpasannya* menjelaskan bahwa penyebab dari berakhirnya Gerakan DI/TII adalah karena penangkapan para pemimpin DI/TII dan anggota DI/TII yang menyerah dan meninggal kelaparan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Taufik Abdullah, editor, *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 10.

<sup>14</sup>“Surat dari Kepala Staff SWKS III Kepada Komandan Brigade (Komandan Daerah I), no. 58/ SWKS III/1949.” dalam “Laporan Aktivitas Pasukan Gerakan DI/TII Tegal” Ditetapkan di Semarang pada 28 Januari 1951 (Arsip Koleksi Komando Daerah Diponegoro No. 85, Museum Mandala Bhakti).

<sup>15</sup>Dinas Sejarah Militer TNI, *Gerakan DI/TII Jawa Tengah...*, hlm. 256.

Ruang lingkup spasial skripsi ini adalah Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal menjadi ruang lingkup spasial karena Tegal merupakan salah satu tempat penyebaran paham DI/TII. Pasukan DI/TII memilih Tegal karena letak Tegal yang dekat dengan Jawa Barat dapat mempermudah koordinasi antara pasukan DI/TII di Jawa Tengah dengan pasukan DI/TII di Jawa Barat. Masyarakat Tegal yang agamis juga memudahkan pasukan DI/TII untuk menyebarkan gerakannya.

Ruang lingkup keilmuan dalam skripsi ini adalah sejarah militer. Sejarah militer menjadi ruang lingkup keilmuan karena skripsi ini berfokus pada usaha yang TNI lakukan dalam menumpas Gerakan DI/TII, sedangkan usaha-usaha tersebut lebih banyak dilakukan melalui operasi militer seperti Operasi Gerakan Benteng Negara, Operasi Benteng Raiders dan Operasi Guntur.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut.

*Pertama*, menganalisis mengenai penyebab terjadinya Gerakan DI/TII Tegal; *Kedua*, menerangkan proses penyebaran Gerakan DI/TII Brebes hingga gerakan tersebut dapat sampai menyebar ke Tegal; *Ketiga*, menjelaskan bagaimana kronologi Gerakan DI/TII Tegal secara sistematis, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan TNI untuk menumpas Gerakan DI/TII di Tegal.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang aktivitas Gerakan DI/TII telah beberapa kali dilakukan dan diajukan sebagai acuan serta telaah dalam skripsi ini. Buku pertama yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini berasal dari skripsi berjudul “Gerakan DI/TII di Brebes Selatan Kab. Brebes Jawa Tengah 1948-1957” karya Safrudin Arief.<sup>16</sup> Secara garis besar skripsi yang ditulis Syafrudin membahas

---

<sup>16</sup>Safrudin Arief, “Gerakan DI/TII di Brebes Selatan Kab. Brebes Jawa Tengah 1948-1957” (Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret, 2006).

tentang Gerakan DI/TII di Brebes Selatan. Para pengikut Gerakan DI/TII ini sebagian besar berasal dari Laskar Hizbullah yang sakit hati terhadap keputusan reorganisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Laskar Hizbullah adalah kelompok pejuang yang dibentuk pada masa pemerintahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Laskar Hizbullah dibentuk dengan tujuan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan musuh. Dalam merealisasikan usahanya tersebut, Pemerintah Jepang mengadakan pelatihan kemiliteran kepada pemuda berusia 18-20 tahun. Pada perkembangannya, Laskar Hizbullah juga berkembang di daerah-daerah seperti Sulawesi Selatan dengan pimpinan Kahar Muzakar dan KH. Abdul Wahid Hasyim yang mendirikan Laskar Hizbullah di Jawa Timur.

Dalam mengelola kelompok Hizbullah, Pemerintah Jepang dibantu oleh Partai Masyumi. Pemerintah Jepang hanya bertugas untuk memberikan dana dan selanjutnya yang mengelola dana tersebut adalah Partai Masyumi. Dalam perkembangannya, dana yang diberikan oleh pemerintah, hanya digunakan untuk mendirikan kelompok laskar saja, sisanya para anggota menggunakan dananya sendiri untuk membeli makanan dan pakaian. Para kyai dari berbagai pesantren terkadang juga turut serta membantu anggota laskar dengan memberikan sejumlah dana.

Pada tahun 1945 setelah masa kemerdekaan, Pasukan Hizbullah juga turut serta dalam perang melawan Belanda. Mereka masuk ke dalam kelompok TRI (Tentara Republik Indonesia) bersama mantan anggota PETA dan KNIL. Pada tahun 1948 Perdana Menteri Hatta mengeluarkan keputusan reorganisasi bagi tentara. Anggota yang masuk ke dalam TNI harus mempunyai kemampuan dasar dalam berperang dan pandai dalam berbahasa Belanda. Anggota yang tidak memenuhi persyaratan tersebut harus terkena demobilisasi. Dalam perkembangannya, pasukan yang paling banyak terkena demobilisasi berasal dari pasukan Hizbullah. Mereka yang terkena demobilisasi merasa kecewa dengan keputusan pemerintah, padahal mereka sudah berjuang melawan Belanda, namun ternyata usahanya tersebut tidak dihargai. Para pasukan Hizbullah yang terkena

---

demobilisasi akhirnya memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya dan justru mendirikan sebuah gerakan menentang pemerintah. Salah satu pasukan Hizbullah yang menentang pemerintah adalah Abas Abdullah selaku pemimpin Majelis Islam di Brebes. Dia bersama pasukannya berusaha menguasai Brebes dengan menaklukkan pasukan Laskar seperti GARI dan GRI secara paksa. Tindakan Abas Abdullah diikuti oleh Amir Fatah bersama Batalyon V, Dia ikut bergabung ke dalam Majelis Islam, berusaha mendirikan pemerintahan yang berlandaskan Islam.

Amir Fatah bergabung bersama Majelis Islam diawali dengan diperintahkannya Amir Fatah oleh Dewan Pembina Masyumi untuk masuk ke dalam daerah Tegal dan Brebes. Amir Fatah bersama Batalyon V masuk ke daerah Tegal dan Brebes yang sudah ditinggalkan oleh TNI setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville. Batalyon V masuk ke daerah Brebes mempunyai tujuan untuk menjaga daerah Brebes dan Tegal dari serangan Belanda. Pada perkembangannya Amir Fatah justru memutuskan untuk tidak lagi setia pada RI dan mendirikan Gerakan DI. Hal ini disebabkan oleh Amir Fatah kecewa terhadap keputusan pemerintah yang mau melakukan perundingan dengan Belanda.

Relevansi pustaka karya Safrudin dengan skripsi ini adalah memberikan penjelasan tentang Gerakan DI/TII di Brebes Selatan secara rinci dan secara kronologis. Penjelasan rinci tentang proses pembentukan Laskar dan alasan Amir Fatah mendirikan DI di Jawa Tengah mempermudah penulis dalam menjelaskan tentang awal mula terbentuknya Gerakan DI di Brebes hingga dapat menyebar di Tegal.

Perbedaan pustaka yang ditulis Safrudin dengan skripsi penulis adalah terletak pada topik yang dipilih. Safrudin dalam skripsinya lebih menekankan pada peran yang diambil oleh pasukan laskar dalam Gerakan DI/TII Brebes Selatan. Topik skripsi penulis sendiri adalah tentang peranan TNI dalam memberantas Gerakan DI/TII di Kabupaten Tegal. Ruang lingkup temporal juga menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi Safrudin. Safrudin mengambil lingkup temporal antara tahun 1948 hingga 1957, sedangkan penulis mengambil ruang lingkup temporal antara tahun 1949 hingga tahun 1962.

Pustaka kedua yang menjadi tinjauan pustaka adalah buku berjudul *Darul Islam Sebuah Pemberontakan* karya C. Van Dijk.<sup>17</sup> Secara garis besar, Van Disk dalam bukunya menjelaskan kronologi terjadinya Gerakan DI/TII di Indonesia. Pada tahun 1950-an Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai macam gerakan separatis yang terjadi di berbagai daerah, salah satunya adalah Gerakan DI/TII. Gerakan DI/TII yang pada awalnya hanya berkembang di Jawa Barat, seiring berkembangnya waktu justru menyebar ke daerah lain seperti Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Darul Islam secara harfiah mempunyai arti sebagai rumah atau keluarga Islam. Darul Islam juga dapat digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat yang menjalankan syariat Islam secara taat, sedangkan di Indonesia, Darul Islam mempunyai arti sebagai sebuah gerakan yang terjadi setelah 1945. Gerakan Darul Islam mempunyai cita-cita untuk mendirikan sebuah negara yang berdasarkan pada ideologi Islam dan cara yang mereka lakukan untuk merealisasikan negara Islam adalah melalui cara-cara kekerasan. Pada masa awal kemerdekaan, perkembangan terbentuknya Gerakan Darul Islam relatif lambat. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Belanda di Indonesia yang berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Pada tahun 1948, Kartosuwiryo mulai aktif untuk mendirikan Gerakan DI dengan mulai membentuk tentaranya. Berdasarkan isi Perjanjian Renville, tentara RI diharuskan untuk meninggalkan daerah Jawa Barat, namun peraturan tersebut tidak dipatuhi oleh Pasukan Laskar dan akhirnya hanya TNI saja yang hijrah menuju Jawa Tengah. Menurut Jendral Sudirman dipilihnya kata hijrah dalam usaha penarikan diri pasukan ke Jawa Tengah adalah sebagai perwujudan usaha TNI mundur sementara waktu dan pada waktu yang lebih menguntungkan, TNI akan kembali ke Jawa Barat untuk memperoleh kemenangan.

Pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang menolak hijrah menuju Jawa Tengah secara langsung bertentangan dengan sikap politik Partai Masyumi. Masyumi yang bertanggung jawab dalam mengorganisasi Hizbullah dan Sabilillah

---

<sup>17</sup>C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Pustaka Utama, 1993).

sebenarnya menentang isi Perjanjian Renville, namun karena Perjanjian Renville ditandatangani oleh pemerintah yang sah, maka Masyumi terpaksa menerima isi Perjanjian Renville. Salah satu petinggi Partai Masyumi yang menentang keputusan partai adalah Kartosuwiryo. Menurut Kartosuwiryo perjuangan melawan Belanda harus dilanjutkan, sekalipun tidak didukung oleh TNI, pasukan Hizbullah dan Sabilillah masih dapat berjuang mempertahankan Jawa Barat dari serangan Belanda.

Kondisi Jawa Barat yang tidak dijaga oleh pasukan TNI membuat Kartosuwiryo lebih leluasa untuk membina Pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Kartosuwiryo bahkan membangun susunan pemerintahan sipil dan militernya di Jawa Barat. Dalam waktu satu tahun usaha Kartosuwiryo membuahkan hasil, dia bahkan berhasil mengajak rakyat bergabung bersama gerakannya. Cara yang digunakan Kartosuwiryo dalam menarik rakyat adalah dengan menyebarkan ajaran jihad dan mempresentasikan gerakannya sebagai jihad dalam mendirikan Negara Islam. Kartosuwiryo yang berhasil mengumpulkan massa, kemudian memproklamasikan pendirian Negara Islam Indonesia pada 1949. Pada perkembangan selanjutnya, Gerakan Kartosuwiryo berkembang di berbagai wilayah seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Aceh.

Buku Van Dijk memiliki relevansi dengan skripsi yang akan ditulis. Relevansi tersebut terletak pada penyebab umum terjadinya Gerakan DI/TII terutama dengan DI/TII Jawa Barat. Penyebab umum terjadinya Gerakan DI/TII Jawa Tengah dan Jawa Barat adalah penetapan peraturan reorganisasi oleh pemerintah sehingga menyebabkan terjadinya demobilisasi pada pasukan Laskar. Pasukan Laskar yang tidak dapat menerima keputusan reorganisasi memutuskan untuk mengadakan Gerakan DI/TII. Buku Van Dijk juga memberikan penjelasan tentang cara TNI dalam menyelesaikan Gerakan DI/TII di berbagai daerah sehingga penulis dapat mengetahui taktik operasi penumpasan yang dilaksanakan oleh TNI. Van Dijk juga menerangkan tentang cara-cara yang dilakukan oleh DI untuk menyebarkan pengaruhnya ke masyarakat luas.

Perbedaan antara buku Van Dijk dan skripsi ini meliputi lingkup spasial dan Van Dijk juga lebih menjelaskan secara detail pemikiran tokoh pencetus gerakan

seperti Kartosuwiryo. Tulisan Van Dijk mengambil lingkup tempat beberapa provinsi di Indonesia, sedangkan skripsi ini lebih memfokuskan pada Gerakan DI di Tegal saja. Lingkup penelitian yang lebih sempit memberikan keuntungan skripsi ini sehingga tulisan yang dihasilkan dapat lebih mendalam membahas gerakan yang terjadi di tempat tersebut, berbeda sekali dengan lingkup penelitian yang luas yang membuat pembahasan gerakan yang terjadi tidak terlalu spesifik. Van Dijk juga lebih menjelaskan tentang profil tokoh pembentuk gerakan, bagaimana perjalanan kariernya dan pemikirannya tentang Islam hingga membuat tokoh tersebut termotivasi untuk mendirikan sebuah negara yang berlandaskan Islam, sedangkan skripsi ini lebih menjelaskan tentang profil kelompok Hizbullah secara keseluruhan dan tidak menekankan pada profil individu.

Pustaka ketiga yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku berjudul *Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen 1950* karya Singgih Tri Sulistiyono.<sup>18</sup> Gerakan Angkatan Umat Islam di Kebumen berawal dari konflik yang terjadi antara kelompok elite agama Islam formal dan elite agama Islam nonformal. Elite agama Islam formal cenderung beraliran sekuler dan bekerja di sektor pemerintahan sehingga kelompok elite agama Islam formal sering kali dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memanfaatkan rakyat. Biasanya kelompok elite agama Islam formal lebih mudah dalam menerima perubahan politik dan toleran terhadap musuh-musuh mereka. Kelompok elite agama nonformal sendiri berasal dari kalangan kyai-kyai pondok pesantren. Para kyai ini dalam masyarakat Kebumen dipandang mempunyai ilmu pengetahuan tentang keislaman yang tinggi, sudah haji dan berpakaian sarung, memakai kopiah dan lain-lain. Para kyai ini juga mempunyai sifat yang cenderung tidak toleran terhadap orang-orang kafir (dalam hal ini bangsa Belanda) dan orang-orang komunis.

Perbedaan di antara kelompok Islam formal dan kelompok Islam nonformal kemudian berkembang menjadi konflik yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Dalam hal ini konflik yang terjadi di Kebumen disebabkan oleh

---

<sup>18</sup>Singgih Tri Sulistiyono, *Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen 1950* (Semarang: Mimbar Offset, 2000).

perbedaan pendapat antara kelompok Kyai Affandi dan Kyai Somalangu. Kelompok Kyai Affandi menyarankan Angkatan Umat Islam untuk bergabung bersama Masyumi menjadi sebuah partai politik, namun gagasan ini justru ditolak oleh Kyai Somalangu. Kyai Somalangu berpendapat bahwa AUI adalah sebuah wadah perjuangan untuk mengusir Belanda, bukan untuk berpolitik, urusan politik dinomorduakan saja.

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara tokoh AUI menyebabkan kelompok Kyai Affandi memutuskan untuk keluar dari AUI. Selanjutnya beberapa anggota kelompok Kyai Affandi bergabung bersama pemerintah dan bekerja di pemerintahan, sedangkan Kyai Somalangu tetap pada pendiriannya untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah. Dalam usaha menyebarkan ajarannya, Kyai Somalangu menggunakan mushola sebagai medianya. Mushola dijadikan tempat berkumpul dan menyebarkan ajaran-ajaran jihad, bahkan Kyai Somalangu menggunakan mushola untuk mengajarkan materi tentang penggunaan senjata seperti mortir dan pistol.

Korelasi yang dimiliki antara buku karangan Singgih Tri Sulistiyono dengan skripsi ini adalah dalam usahanya menarik massa baik AUI maupun DI/TII Tegal, keduanya menggunakan ajaran agama. Mereka memberikan penjelasan jihad kepada masyarakat dan diperbolehkan untuk melakukan jihad demi menegakkan Negara Islam. Tulisan Singgih Tri Sulistiyono juga menerangkan tentang peranan ulama di kalangan masyarakat sehingga para ulama dapat mempengaruhi masyarakat untuk mendukung gerakan mereka. Hal ini memberikan informasi penting bagi penulisan skripsi ini sehingga dalam skripsi ini dapat mengetahui apakah ada perbedaan usaha yang dilakukan oleh ulama AUI maupun ulama DI Tegal dalam menarik massa.

Perbedaan antara buku *Pembentukan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen 1950* dengan skripsi ini adalah terletak pada lingkup spasialnya. Gerakan AUI terjadi di daerah Kebumen dan tidak menyebar ke wilayah lain, berbeda sekali dengan Gerakan DI/TII Tegal yang menyebar di hampir wilayah Kerasidenan Pekalongan. Perbedaan lainnya adalah tujuan yang dimiliki oleh Gerakan AUI tidak mutlak untuk mendirikan Negara Islam. Para pemimpin



Gerakan AUI hanya ingin melepaskan Indonesia dari campur tangan asing dan para pemimpin AUI juga menginginkan masyarakat selalu taat pada ajaran Islam. Gerakan DI/TII Tegal mempunyai tujuan berbeda, para pemimpin Gerakan DI Tegal mempunyai tujuan mutlak yaitu mendirikan Negara Indonesia yang berlandaskan ideologi Islam. Amir Fatah berpendapat bahwa inilah cara untuk mencapai sebuah masyarakat yang taat terhadap syariat Islam.

Pustaka keempat yang menjadi tinjauan pustaka skripsi ini adalah skripsi berjudul “Sistem Militer dalam Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat pada Masa Kartosuwiryo (1949-1962)” karya Reno Aprilia Dwijayanto.<sup>19</sup> Skripsi yang dibuat oleh Reno Aprilia Dwijayanto ini menjelaskan tentang terjadinya Gerakan DI/TII di Jawa Barat. Gerakan DI/TII Jawa Barat dibentuk oleh seorang tokoh bernama Kartosuwiryo. Hal yang melatarbelakangi pendirian Gerakan DI/TII berasal dari rasa ketidaksukaan Kartosuwiryo terhadap politisi bergolongan komunis yang berada di pemerintahan. Alasan lainnya adalah Kartosuwiryo ingin membangun masyarakat Indonesia yang berdasarkan pada *Al-qur'an* dan *Hadist*. Dalam usahanya merealisasikan Negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo mengajak tokoh agama maupun politik di Garut yang dia kenal. Cara yang Kartosuwiryo lakukan untuk mengajak para tokoh politik Garut adalah dengan menjelaskan tentang keadaan parlemen yang sudah dikuasi oleh orang-orang komunis, sedangkan ajaran komunis jauh sekali dari syariat Islam. Kartosuwiryopun berinisiatif untuk mendirikan Negara Islam Indonesia yang sesuai dengan kaidah Islam. Kartosuwiryo juga menyebarkan ajarannya kepada tentara Hizbullah dan Sabilillah. Hal ini dia lakukan untuk menjadikan pasukan Hizbullah dan Sabillillah sebagai tentara Negara Islam Indonesia.

Kartosuwiryo mendirikan Gerakan DI/TII Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Pengikut gerakan DI/TII Jawa Barat berasal dari berbagai kalangan seperti tentara Hizbullah dan Sabilillah, para ulama dan dari kalangan rakyat Jawa Barat. Gerakan Kartosuwiryo yang mendapatkan banyak dukungan dari rakyat membuat

---

<sup>19</sup>Reno Aprilia Dwijayanto, “Sistem Militer dalam Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat pada Masa Kartosuwiryo Tahun 1948-1962” (Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

pemerintah khawatir akan terjadinya perpecahan di Jawa Barat. Dalam usahanya mengatasi Gerakan DI/TII Jawa Barat, pemerintah menggunakan dua cara yaitu melalui diplomasi dan operasi penumpasan.

Pada awalnya pemerintah lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan Kartosuwiryo dengan jalan diplomasi. Usaha diplomasi yang dilaksanakan pemerintah pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan pihak DI ingin melakukan diplomasi langsung dengan presiden bukan dengan utusan pemerintah. Jalur diplomasi yang gagal membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengadakan operasi penumpasan terhadap Gerakan DI.

Relevansi pustaka keempat dengan skripsi yang akan ditulis adalah karena skripsi berjudul “Sistem Militer dalam Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat pada Masa Kartosuwiryo (1949-1962)” membahas tentang struktur tentara Islam Indonesia. Dalam susunan TII, tentara terdiri atas panglima tertinggi, divisi, resimen, batalyon, kompi, peleton, regu dan personel. Informasi yang menjelaskan tentang susunan tentara tersebut, dapat penulis gunakan untuk menjelaskan susunan tentara Islam di dalam Gerakan DI/TII Tegal. Dalam pustaka keempat juga dijelaskan tentang sistem perekrutan yang dilaksanakan oleh DI. Hal ini sangat penting untuk diketahui bagaimana cara DI mendapatkan pengikutnya.

Perbedaan pustaka keempat dengan skripsi ini adalah tokoh penggerak Gerakan DI. Pada pustaka keempat Kartosuwiryo menjadi tokoh utama dalam Gerakan DI/TII di Jawa Barat sehingga biografinya dijelaskan secara jelas, sedangkan dalam Gerakan DI Tegal, tokoh utama yang menggerakkan Gerakan DI Tegal adalah Amir Fatah dan para pengikut laskarnya sehingga yang dibahas adalah Amir Fatah dan anggota kelaskaran. Perbedaan selanjutnya adalah operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI. TNI wilayah Jawa Barat menumpas Gerakan DI melalui Operasi Pagar Betis sedangkan TNI Jawa Tengah dalam menyelesaikan Gerakan DI Tegal menggunakan Operasi Gerakan Banteng Negara.

Pustaka terakhir yang menjadi acuan dalam skripsi ini adalah pustaka berjudul “Reaksi Serikat Buruh dan Organisasi Massa Terhadap Teror dan Gangguan Keamanan DI/TII di Kabupaten Tegal Tahun 1949-1962” karya Dudun

Parwanto.<sup>20</sup> Dalam skripsinya, Dudun menjelaskan tentang Gerakan DI/TII yang terjadi di Kabupaten Tegal beserta dampaknya terhadap aktivitas buruh pabrik di Tegal.

Menurut Dudun, Gerakan DI/TII Tegal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor sosial-politik dan faktor sosial-ekonomi. Faktor sosial-politik disebabkan karena bentuk negara berubah yang sebelumnya berbentuk negara kesatuan menjadi negara federal. Golongan agama ekstrim yang tidak menerima bentuk negara federal memutuskan untuk mendirikan negara sendiri yang berlandaskan pada ideologi Islam. Dalam bidang sosial-ekonomi, Gerakan DI/TII dilatarbelakangi oleh ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat Tegal. Dalam hal pertanian, beberapa daerah di Tegal memiliki tingkat kesuburan yang berbeda sehingga berdampak pada panen yang dihasilkan. Kecamatan Talang, Margasari, Balapulang dan Adiwerna adalah beberapa daerah yang memiliki hasil panen surplus, sedangkan Suradadi, Pangkah dan Kedungbanteng adalah contoh daerah yang hasil panenanya 50% gagal.

Faktor pengangguran yang mencapai angka 10% di Jawa Tengah juga menjadi faktor sulitnya kehidupan ekonomi masyarakat Tegal. Kesulitan-kesulitan tersebut membuat masyarakat Tegal berupaya untuk mencari jalan keluar demi memperbaiki kehidupannya. Dalam kondisi kesulitan tersebut, Amir Fatah muncul menjadi sosok yang kharismatik. Dia menjanjikan kehidupan yang baik bagi masyarakat Tegal yang mau bergabung bersama gerakannya.

Relevansi pustaka karya Dudun dengan skripsi ini adalah lingkup spasial yang membahas tentang Gerakan DI/TII di Tegal. Dalam skripsi karya Dudun juga dijelaskan tentang kondisi masyarakat Tegal yang miskin menjadi salah satu faktor berkembangnya Gerakan DI/TII di Tegal. Kondisi masyarakat yang miskin yang disertai dengan tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat cenderung mudah untuk dipengaruhi paham-paham separatis sehingga tidak

---

<sup>20</sup>Dudun Parwanto, "Reaksi Serikat Buruh dan Organisasi Massa Terhadap Teror dan Gangguan Keamanan DI/TII di Kabupaten Tegal Tahun 1949-1962" (Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2000)

mengerankan jika masyarakat Tegal banyak yang bergabung bersama Gerakan DI/TII Amir Fatah. Informasi terkait kondisi masyarakat Tegal bermanfaat bagi penulis dalam menjelaskan cara DI/TII merekrut anggotanya.

Perbedaan antara skripsi karya Dudun dengan skripsi ini terletak pada dampak yang ditimbulkan. Dalam skripsi Dudun, Gerakan DI/TII dampak yang ditimbulkan lebih ditekankan pada reaksi buruh yang ada di Tegal. Para buruh banyak yang melakukan aksi protes yang ditujukan kepada pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan DI/TII. Hal ini disebabkan karena gerakan yang dilakukan oleh DI/TII merugikan para buruh berupa ancaman keamanan ketika bekerja dan menurunkan efektivitas buruh dalam bekerja.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam kamus bahasa Indonesia, pemberontakan mempunyai arti sebagai perlawanan kepada kekuasaan pemerintah.<sup>21</sup> Dalam studi ini pemberontakan memiliki arti sebagai suatu perlawanan kepada kekuasaan pemerintah dengan menggunakan unsur-unsur kekerasan.<sup>22</sup>

Terjadinya pemberontakan mengindikasikan bahwa di negeri tersebut terdapat masalah. Ketika suatu pemberontakan terjadi di satu negara maka terjadilah *chaos* atau kekacauan seperti jatuhnya korban jiwa, memiliki persenjataan terlarang, dan pemberontakan yang semakin berkembang. Faktor pendorong terjadinya pemberontakan bisa beragam, namun yang paling sering menjadi pemicu adalah terkait nasionalisme yang berlebihan, kekuatan religius, dan kurangnya politik maupun ekonomi dari suatu kelompok.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, penyebab terjadinya Gerakan DI/TII Tegal termasuk ke dalam alasan agama dan politik. Dalam hal politik, pasukan DI/TII ingin

---

<sup>21</sup>W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 20.

<sup>22</sup>Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 288.

<sup>23</sup>Komar Kantaatmadja, *Evolusi Hukum Kebiasaan Internasional* (1998), hlm. 53.

mendirikan Negara Islam karena rasa kecewa mereka terhadap keputusan reorganisasi. Alasan lainnya adalah Amir Fatah tidak setuju dengan pendirian Republik Indonesia Serikat. Menurut Amir Fatah, RIS adalah bentuk negara yang berdasarkan atas ideologi liberal dan itu bertentangan dengan Islam. Dalam sudut pandang agama, Amir Fatah ingin mendirikan negara yang berasaskan agama Islam dan menerapkan syariat Islam kepada setiap penduduknya.

Darul Islam menurut etimologi bahasa Arab adalah sebutan negara atau wilayah yang dengan umat Islam sebagai pemimpinya. Dalam wilayah Darul Islam, pemerintah menerapkan syariat kepada rakyatnya.<sup>24</sup> Van Dijk menguraikan Darul Islam menjadi *dar al-Islam* yang berarti rumah atau keluarga Islam. Van Dijk juga menerangkan bahwa dalam *dar al-Islam* masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Penyebutan Darul Islam menjadi DI telah melalui berbagai proses. Para pembentuk Negara Islam membuat istilah DI karena mereka menginginkan pembentukan sebuah negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Para pendiri DI/TII kemudian menetapkan istilah DI dalam sebuah konferensi yang bertempat di Cirebon. Dalam konferensi tersebut juga menghasilkan sebuah keputusan untuk membuat sebuah peraturan-peraturan yang mengikat umat Islam dan juga menetapkan aturan tentang pembagian tiga wilayah kekuasaan DI yaitu D I, D II, D III. Pembagian wilayah tersebut berdasarkan pada dominasi kekuasaan NII. D I adalah sebuah wilayah yang akan pemerintah DI/TII jadikan sebagai ibu kota NII. Pemerintah di daerah D I nantinya akan mengawasi secara ketat terlaksananya hukum Islam. D II adalah sebuah wilayah dengan dominasi masyarakat Islam, dan D III adalah daerah yang belum berhasil orang Islam kuasai.<sup>25</sup>

Amir Fatah adalah salah satu tokoh pelopor pendirian Gerakan Darul Islam di Jawa Tengah. Daerah operasinya meliputi Brebes dan Tegal. Pada awal gerakan, Amir Fatah berusaha merekrut penduduk dengan cara menggunakan

---

<sup>24</sup>Redaksi Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia Jilid III* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1989), hlm. 36.

<sup>25</sup>Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan...*, hlm.79.

ajaran agama terkait jihad. Amir Fatah berpendapat bahwa gerakan untuk mendirikan Negara Islam merupakan salah satu bentuk dalam berjihad sehingga ketika Amir Fatah berhasil mendirikan Negara Islam, penduduk dapat menjalankan setiap syariat Islam dengan baik. Dalam membangun Gerakan Darul Islam, para anggota DI/TII melakukan berbagai hal seperti menyebarkan ajaran jihad kepada para penduduk. Para anggota DI/TII menyatakan bahwa usaha mendirikan Negara Islam juga bagian dari jihad karena komponen Negara Islam terlepas dari unsur-unsur liberalisme.

Ancaman militer adalah upaya ancaman yang suatu kelompok lakukan kepada NKRI berupa penggunaan kekuatan bersenjata maupun tidak bersenjata untuk menyerang atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.<sup>26</sup> Dalam hal ini, penyerangan yang DI/TII lakukan mempunyai tujuan mengancam keutuhan wilayah NKRI. Dampak dari penyerangan DI/TII pun seringkali memberikan ancaman terhadap keselamatan penduduk, sehingga TNI selaku pemegang tanggung jawab keselamatan negara turun tangan untuk menumpas Gerakan DI/TII. Salah satu contoh penyerangan DI/TII adalah serangan yang terjadi pada 26 April 1950. Dalam serangan tersebut, sekitar 1000 penduduk Margasari harus pemerintah ungsikan dari rumahnya.

Strategi militer adalah kebijakan yang sebuah organisasi laksanakan untuk mengejar sasaran strategi yang sudah mereka bentuk.<sup>27</sup> Bentuk strategi militer berupa pembinaan, pengembangan, penggelaran dan penggunaan seluruh kemampuan militer dengan tujuan melindungi dan menjaga kepentingan nasional. Sebuah strategi militer yang baik harus mempunyai koordinasi tim kerja, memiliki tema dan faktor-faktor pendukung yang sekiranya dapat membuat strategi militer tercapai secara maksimal. Biasanya faktor pendukung dalam strategi militer terdiri atas pendanaan yang cukup, sehingga akomodasi seperti senjata, peluru, makanan

---

<sup>26</sup>“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1960.” (<https://www.bphn.go.id> diunduh pada 28 Juli 2019)

<sup>27</sup>Arti Kata “Operasi Militer” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.web.id/strategi/> diakses pada 28 Juli 2019)

dan pakaian dapat terpenuhi. TNI dalam menyelesaikan permasalahan DI/TII, terlebih dahulu menyusun strategi militer, di antaranya adalah operasi penumpasan. Operasi adalah tindakan atau gerakan militer dengan pimpinan perwira muda.<sup>28</sup> Kata operasi dalam bidang militer sering kali terkait dengan gerakan penumpasan terhadap suatu gerakan militer seperti penumpasan Gerakan PKI ataupun yang lain. Skripsi ini menggunakan kata penumpasan untuk menjelaskan operasi militer yang TNI laksanakan dalam mengatasi Gerakan DI/TII di Tegal. Elemen penting dalam melakukan setiap operasi militer adalah seorang prajurit. Prajurit TNI merupakan elemen penting dalam penegakan kedaulatan sebuah negara. Fungsi TNI tidak hanya sebagai alat pemerintah saja, melainkan juga sebagai pelopor perjuangan kemerdekaan, ideologi rakyat, dan negara.<sup>29</sup> Perjuangan seorang prajurit adalah usaha yang seorang warga negara lakukan dengan tujuan mempertahankan kedaulatan negaranya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjuangan mempunyai arti sebuah usaha yang penuh dengan kesulitan dan bahaya.<sup>30</sup>

TNI dalam melakukan gerakan penumpasan menggunakan dua cara, yaitu melalui jalur diplomasi maupun jalur militer. Alasan TNI memilih jalur diplomasi adalah untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, namun pada perkembangannya jalur militer harus tetap TNI lakukan untuk mempercepat menumpas Gerakan DI/TII. Dalam melaksanakan operasi militer, TNI menggunakan taktik Perang Gerilya. Taktik Perang Gerilya adalah hasil buah pemikiran dari AH. Nasution. Dalam Perang Gerilya, TNI melakukan pengepungan dan penyerangan dengan cepat dan lalu menghilang. Biasanya TNI tidak hanya menyerang musuh secara langsung, tetapi TNI juga menyerang tempat-tempat pertahanan musuh seperti pos

---

<sup>28</sup>Pengertian “Operasi” menurut KBBI online (<https:kbbi.web.id/operasi> diakses pada 2 April 2019).

<sup>29</sup>A.H. Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya* (Yogyakarta: Narasi, 2012), hlm. 143.

<sup>30</sup>Arti Kata “Perjuangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kamuslengkap.com/kamus/kbbi/arti-kata/perjuangan/> diakses pada 2 April 2019).

dan gudang-gudang tempat untuk menyimpan makanan dan senjata. Penyebab TNI menggunakan taktik Perang Gerilya dalam menumpas Gerakan DI/TII Tegal karena pada masa awal kemerdekaan Pemerintah Indonesia menghadapi keterbatasan dana yang tidak memungkinkan TNI untuk membeli banyak peralatan perang, sehingga untuk mengatasi hal tersebut TNI memutuskan untuk menggunakan taktik Perang Gerilya. Dalam taktik Perang Gerilya, TNI hanya membutuhkan senjata api dan pengetahuan tentang struktur geografis daerah pertempuran.<sup>31</sup> Dalam Perang Gerilya pun, TNI membutuhkan partisipasi rakyat untuk menyukseskan operasi militer. Bentuk keterlibatan rakyat dalam Perang Gerilya dapat berupa membantu TNI dalam aktivitas baku tembak, tidak memberikan tempat persembunyian kepada musuh maupun tidak memberikan dukungan berupa makanan kepada musuh. Cara-cara ini sangat membantu TNI dalam menumpas Gerakan DI/TII.

Operasi militer yang TNI lakukan dalam menumpas Gerakan DI/TII Tegal salah satunya adalah Gerakan Banteng Negara. TNI membentuk Gerakan Banteng Negara pada Januari 1950. Kolonel Sarbini selaku pimpinan GBN mempunyai tugas untuk mencegah Gerakan DI/TII meluas di luar daerah Kerasidenan Pekalongan. Dalam usaha menyukseskan Operasi GBN, pemerintah menunjuk Letkol Ahmad Yani dan Letkol Bachrum untuk membantu Letkol Sarbini. Pasukan Gerakan Banteng Negara tidak hanya terdiri atas pasukan TNI tetapi juga mengikutsertakan kesatuan polisi bersenjata. Beberapa tugas yang pasukan GBN lakukan, antara lain melakukan patroli di desa-desa yang berada di Kerasidenan Pekalongan, melakukan penyergapan terhadap tempat-tempat persembunyian DI/TII dan melakukan pengrusakan terhadap gudang-gudang tempat penyimpanan makanan DI/TII.

Brigade adalah satu angkatan bersenjata yang terdiri atas dua, tiga atau empat resimen. Dalam kesatuan militer, brigade merupakan bagian dari divisi. Seorang Kolonel atau Brigadir Jenderal akan memimpin pasukan yang berjumlah

---

<sup>31</sup>Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 98.



3000-5000 orang.<sup>32</sup> Pada Operasi Gerakan Banteng Negara, satuan tempur yang bertugas untuk menumpas Gerakan DI/TII adalah Brigade Infanteri Divisi III dan dari Divisi IV. Brigade Infanteri Divisi III dalam menjalankan tugasnya dibantu beberapa Batalyon, di antaranya adalah Batalyon Sarjono, Batalyon Suryosumeno, Batalyon Sudarmo dan Batalyon Surono. Batalyon adalah kesatuan tentara yang terdiri dari dua sampai enam kompi atau baterai. Pemimpin Batalyon biasa berpangkat Mayor atau Letkol. Pada setiap negara mempunyai sistem batalyon yang berbeda-beda, namun biasanya batalyon adalah bagian dari resimen, grup atau brikade. Secara struktur organisasi, Kolonel Gatot Subroto selaku Panglima Divisi III adalah pimpinan tertinggi dalam Gerakan Banteng Negara, namun pimpinan Komando Operasi adalah Komandan Brigade II/III Letkol Sarbini. Tugas Letkol Sarbini adalah memimpin pasukan gabungan yang berasal dari beberapa batalyon yaitu batalyon tempur, batalyon administrasi dan staff pendukung. Operasi gabungan yang mulai bergerak pada 15 Januari 1950 ini berkududukan di Slawi, Tegal. Misi pertama yang Mereka lakukan untuk menyukseskan Operasi Gerakan Banteng adalah memutuskan koordinasi di antara Gerakan DI/TII Jawa Tengah dengan Gerakan DI/TI Jawa Barat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang skripsi ini gunakan adalah metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>33</sup> Metode sejarah mempunyai beberapa langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Tahap heuristik adalah langkah pertama dalam metode sejarah. Heuristik adalah tahapan dalam pencarian sumber-sumber sejarah. Dalam metode sejarah, sumber sejarah terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam skripsi ini adalah dokumen surat dari Kepala Staff SWKS

---

<sup>32</sup>Arti kata “Brigade” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (<https://kbbi.web.id/brigade.html> diakses pada 28 Juli 2019)

<sup>33</sup>Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah Terjemahan Nugroho Notosusanto* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

III Kepada Komandan Brigade (Komandan Daerah I), no. 58/ SWKS III/1949 serta beberapa surat kabar sezaman.

Dokumen surat dari Kepala Staff SWKS III Kepada Komandan Brigade (Komandan Daerah I), no. 58/ SWKS III/1949 penulis dapatkan dari Museum Mandala Bakti sebagai tempat penyimpanan arsip-arsip militer. Dokumen tersebut menjadi penting dalam penulisan skripsi ini karena dalam dokumen surat kepala SWKS III menjelaskan tentang kegiatan operasi yang TNI lakukan selama tahun 1949-1950 di Brebes dan Tegal. Kendala dalam mencari sumber di Museum Mandala Bakti adalah kebanyakan sumber berasal dari tahun 1950-an sehingga kondisi kertas sudah lapuk dan mudah sobek.

Sumber primer lain dalam skripsi ini adalah koran sezaman. Koran tersebut penulis dapatkan dari pencarian di berbagai instansi seperti Depo Arsip Suara Merdeka dan Monumen Pers Nasional. Penulis mendapatkan beberapa judul koran ketika mendatangi Depo Arsip Suara Merdeka, judul tersebut seperti *401 Tahanan Dibebaskan, Pasukan AUI Lapar Setengah HA Jagung Habis Dimakan* dan lain-lain. Monumen Pers Nasional memberikan penulis beberapa sumber koran dari koran Angkatan Darat, koran Merdeka dan koran Mimbar Indonesia.

Sumber sekunder didapatkan melalui studi pustaka terhadap buku-buku karya para sarjana maupun para peneliti yang relevan. Fungsi dari sumber sekunder adalah melengkapi sumber-sumber primer dalam rangka mendapatkan pemahaman dan analisis dari peristiwa yang diteliti. Dalam skripsi ini sumber sekunder berasal dari buku-buku bertemakan militer. Buku-buku tersebut didapatkan dari Perpustakaan Sejarah Universitas Diponegoro dan Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro.

Kritik adalah tahapan kedua dalam metode sejarah. Tujuan kritik mempunyai tujuan untuk mengkaji kebenaran sumber-sumber sejarah. Pada tahap ini, penulis melakukan kritik intern dengan membandingkan sumber yang didapatkan dari Museum Mandala Bakti dengan koran-koran sezaman.

Tahap ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi. Interpretasi adalah tahapan dalam menghubungkan fakta-fakta yang berasal dari sumber sejarah. Dalam melakukan interpretasi membutuhkan imajinasi dalam menghubungkan

fakta-fakta sejarah sehingga memudahkan penulis dalam merangkaikan peristiwa sejarah secara berurutan.

Langkah terakhir adalah histiografi. Dalam tahap ini penulis merangkaikan fakta-fakta sejarah yang sudah melalui tahapan interpretasi ke dalam bentuk sebuah cerita. Penulis berusaha untuk menulis kembali sebuah peristiwa sejarah ke dalam sebuah tulisan berdasarkan pada bukti-bukti yang sudah dikumpulkan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari **Bab I** yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada **Bab II** menerangkan tentang gambaran umum wilayah Tegal tahun 1949-1962 yang meliputi; perkembangan Tegal dari sejak pendirian hingga masa terjadinya Gerakan DI/TII, kondisi geografis menjelaskan tentang gambaran wilayah Tegal yang terdiri dari daerah dataran tinggi dan dataran rendah, kondisi demografis meliputi keadaan penduduk di wilayah Tegal dari segi jumlah penduduk maupun keberagaman suku yang berada di Tegal, kondisi sosial ekonomi yaitu menjelaskan tentang potensi alam dan mata pencaharian penduduk Tegal pada masa sebelum kemerdekaan hingga awal kemerdekaan, kondisi sosial budaya menerangkan tentang problematika sosial yang terjadi di antara masyarakat Tegal, kondisi sosial politik mendeskripsikan tentang problematika perpolitikan masyarakat Tegal sebelum masa kemerdekaan hingga tahun 1950, dan yang terakhir adalah pembentukan dan perkembangan organisasi TNI di Tegal yang menjelaskan tentang perkembangan dan perubahan yang terjadi pada organisasi TNI pada masa awal proklamasi hingga TNI resmi membentuk Batalyon Infanteri 407.

Pada **Bab III** menerangkan tentang kronologi terjadinya Gerakan DI/TII Tegal tahun 1949-1954 yang meliputi; pembentukan Laskar yang menjadi komponen penting dalam Gerakan DI/TII Tegal kemudian pasukan Laskar mempunyai beberapa alasan yang mendorong mereka mendirikan Gerakan DI/TII. Dalam prosesnya Amir Fatah dan kawan-kawan melakukan usaha untuk menarik

masyarakat Tegal untuk mau bergabung dalam Gerakan DI/TII, setelah berhasil mendapatkan massa akhirnya terjadilah proses terjadinya Gerakan DI/TII.

Pada **Bab IV** menguraikan tentang penumpasan Gerakan DI/TII Tegal tahun 1950-1962 yang meliputi; persiapan pembentukan Gerakan Banteng Negara yang meliputi alasan pembentukan Gerakan Banteng dan persiapan yang TNI lakukan untuk menyukseskan Operasi Banteng Negara, taktik dan strategi yang TNI gunakan dalam operasi penumpasan. Pada saat TNI melakukan operasi penumpasan, TNI menghadapi berbagai hambatan yang terkadang menimbulkan kerugian, namun hambatan tersebut pada akhirnya dapat TNI atasi dan membuat DI/TII harus mengakhiri gerakannya.

Pada **Bab V** menjelaskan tentang kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah pada bab I.